

Pembaruan Sistem Pendidikan Islam: Sekolah Islam Terpadu

Muhammad Frandani

Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor,
Indonesia

dani.aboeharun@gmail.com

Article Information: Received Jan 25, 2023, Accepted May 13, 2023, Published May 16, 2023

Abstract

If compared, Islamic education in Indonesia is like a train that has been running on a track for a very long time, passing through cool and hot nature, traversing steep valleys, pitch-dark jungles, and various obstacles, as forges for the path of Islamic education in the archipelago. When talking about the modernization of Islamic education, experts focus more on three objects of study, namely Islamic boarding schools, madrasas, and tertiary institutions. Meanwhile, school brands do not get a major place among Islamic education researchers. Only a few researchers or educational thinkers have a focus on Islamic educational institutions called schools. So it becomes interesting when there is a study related to the Integrated Islamic School (SIT), so that various efforts of "Muslim elites" can be identified in the development of the Islamic education system. This research is a historical study of Islamic education that uses two approaches, namely the historical approach and the descriptive approach. The research results show that although the emergence of integrated Islamic schools is a response to dissatisfaction with educational practices in Indonesia, until now, integrated Islamic schools remain an integral part of the national education system.

Keywords: *Integrated Islamic School; Muslim Elites; Renewal Of The Islamic Education System*

Abstrak

Jika diibaratkan, pendidikan Islam di Indonesia laksana kereta yang sudah berjalan di lintasan waktu yang sangat panjang, melewati alam yang sejuk dan terik, melintasi lembah yang terjal, hutan rimba yang gelap gulita, serta berbagai aral melintang, sebagai tempaan jejak jalan pendidikan Islam di Nusantara. Ketika berbicara tentang modernisasi pendidikan Islam, para pakar lebih fokus kepada tiga objek studi, yaitu pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Sementara *brand* sekolah tidak mendapatkan tempat yang utama di kalangan peneliti pendidikan Islam. Hanya sedikit peneliti ataupun pemikir pendidikan yang mempunyai fokus terhadap institusi pendidikan Islam yang disebut sekolah. Maka menjadi menarik tatkala terdapat kajian yang berkenaan dengan Sekolah Islam Terpadu (SIT), sehingga dapat diketahui berbagai upaya "kalangan elite muslim" dalam perkembangan sistem pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah pendidikan Islam yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun munculnya sekolah Islam terpadu merupakan respons atas ketidakpuasan terhadap praktik pendidikan di Indonesia, hingga saat ini, Sekolah Islam Terpadu tetap menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional

Kata kunci: Muslim elite; Pembaruan sistem pendidikan Islam; Sekolah Islam Terpadu

Pendahuluan

Jika diibaratkan, pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini seperti kereta yang sudah berjalan di lintasan waktu yang sangat Panjang, melewati alam yang sejuk, terik, panas, dingin melintasi lembah yang terjal, hutan rimba yang gelap gulita, serta berbagai aral melintang yang dihadapi, sebagai tempaan jejak jalan pendidikan Islam di Nusantara (Syafri, 2022:vii). Kereta pendidikan Islam di Indonesia terus bergerak tidak berhenti untuk menemukan jalan dan sampai di tujuan akhir.

Proses Islamisasi Nusantara satu paket dengan proses Islamisasi lembaga pendidikan Nusantara. Proses tersebut dimulai sejak kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bermunculan. Di pulau Jawa misalnya, terdapat pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel) di Ampel Denta Surabaya dan pesantren yang didirikan oleh Raden Paku (Sunan Giri) di Giri. Selanjutnya di pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, proses islamisasi melalui meunasah (berasal dari kata *madrasah*), dayah (berasal dari kata *zawiyah*), dan rangkang. Di Sumatera Barat ada pula lembaga pendidikan surau (yang tadinya tempat untuk anak laki-laki Minang dan mengajarkan tradisi adat Minangkabau), kemudian menjadi penyaluran agama Islam (Nata, 2011: 262-263).

Lalu memasuki akhir abad ke-19 Indonesia mulai dimasuki gerakan pembaruan/modernisasi sistem pendidikan Islam dari Timur Tengah, khususnya negara Mesir dan Makkah. Gerakan pembaruan itu memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan pendidikan dan agama Islam di Indonesia pada masa itu dan masa akan datang (Masrurroh dan Umiarso, 2011: 12-13)

Pembaruan sistem pendidikan Islam yang dimaksud adalah upaya merekonstruksi, merevitalisasi, mereformasi, menata kembali, dan meninjau kembali pendidikan Islam dengan berbagai aspeknya agar disesuaikan dengan perkembangan dan dapat menjawab kebutuhan zaman. Pembaruan pendidikan Islam dilakukan terhadap berbagai aspek pendidikan, antara lain pembaruan terhadap kelembagaannya, kurikulumnya, manajemennya, proses belajar mengajarnya, mutu lulusannya, sarana prasarananya, dan lain sebagainya agar dapat disesuaikan dengan zaman (Nata, 2019: 13).

Sepulangnya para anak negeri ini dari menuntut ilmu di Timur Tengah seperti Mesir, Makkah dan Madinah ke nusantara, mereka memandang urgensi pembaruan lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu yang dikala itu kondisi pendidikan anak-anak pribumi memprihatinkan karena politik diskriminasi yang diterapkan Belanda. Di Jawa misalnya, ada yang memperbarui lembaga pendidikan Islam dengan tetap menjaga orisinalitasnya seperti Pesantren Tebu Ireng yang dipimpin oleh Syaikh Hasyim Asy'ari. Ada pula yang mendirikan lembaga pendidikan dengan mengadopsi sistem pendidikan Belanda seperti madrasah yang diprakarsai oleh Jam'iyat Khair, Al Irsyad dan Muhammadiyah. Di Sumatera Barat ada *Adabiyah*

School yang mengombinasikan pendidikan sekolah Belanda dengan pendidikan Islam, ada yang mengatakan ini adalah cikal bakal Sekolah Islam di Indonesia.

Posisi madrasah sendiri di Indonesia mulai diakui pada tahun 1970-an ketika Menteri Agama, Mukti Ali, mengenalkan standardisasi sistem pendidikan madrasah melalui SKB 3 Menteri. Kemudian pendidikan madrasah diperkuat oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa madrasah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan pemerintah memperkuat posisi madrasah dengan mengeluarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa madrasah setara dengan sekolah umum. Namun demikian, hingga saat ini madrasah masih dianggap lembaga pendidikan kelas dua (Kurnaengsih, 2015:79).

Berkaitan dengan Sekolah Islam, selama ini studi tentang pendidikan Islam mayoritas terfokuskan kepada *brand* madrasah, pesantren, surau, dayah dan perguruan tinggi Islam yang berada di bawah Kementerian Agama. Di antara peneliti dan penulis yang *concern* dengan lembaga pendidikan Islam tersebut adalah Moh. Roqib, Hasbi Indra, Mahmud Arif, Mujamil Qomar dan Abuddin Nata. Mereka ketika berbicara tentang pembaruan pendidikan Islam, maka yang menjadi objek studi adalah ketiga lembaga tersebut di atas dan tidak membahas secara mendalam tentang institusi pendidikan Islam dengan model “sekolah”. Hal ini bisa dimaklumi karena sekolah selama ini diasosiasikan sebagai sekolah yang mengajarkan pendidikan umum. Di antara sedikit pemikir yang mengulas - meskipun tidak terlalu luas - tentang lembaga pendidikan Islam dengan model sekolah adalah Azyumardi Azra. Azra menyatakan bahwa para pengamat dalam dan luar negeri menyebut bahwa munculnya sekolah Islam di kalangan elite muslim sebagai pola ‘santrinisasi’. ‘*Santrinisasi*’ ini sebagai awal kebangkitan umat Islam, meskipun kebangkitan ini memunculkan perdebatan, apakah ia bersifat politis atau kultural (Abdussuyukur, 2018: 3).

Dalam rangka mengenalkan simbol-simbol dan lembaga-lembaga Islami kepada masyarakat luas, kelas menengah Muslim melakukan berbagai eksperimen untuk mengislamisasikan pendidikan formal di antaranya mendirikan sekolah-sekolah Islam yang berkualitas yang menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Beberapa contoh sekolah-sekolah model ini adalah Al-Azhar, Al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendekia, Madania, Bina Insan, Dwi Warna, Lazuardi, Fajar Hidayah, Nurul Fikri, dan Salman al-Farisi (Azra, 2006: 18 dalam Kurnaengsih, 2014: 79).

Tidak seperti madrasah yang biasanya memiliki fasilitas serba terbatas dan peserta didiknya dari menengah ke bawah, sekolah-sekolah Islam tampak menjadi sekolah-sekolah elite dengan merekrut para siswa dari kalangan menengah ke atas dan fasilitas-fasilitas yang *excellent* dan mahal, seperti ruangan ber-AC, perpustakaan digital dan laboratorium. Beberapa di antaranya mengadopsi sistem *boarding school* yang berorientasi pada penanaman kedisiplinan dan kesalehan

peserta didik. Pada dasarnya sekolah-sekolah Islam itu dibuat model seperti sekolah-sekolah umum dan secara administratif berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, karakter keislamannya tampak pada cara sekolah memberikan perhatian pendidikan moral keagamaan. Pertumbuhan sekolah-sekolah Islam berkualitas seperti ini tidak diragukan lagi diinspirasi oleh adanya usaha islamisasi pendidikan formal. Di antara sekolah Islam yang secara masif menyebar di berbagai daerah di Indonesia adalah Sekolah Islam Terpadu (SIT).

Maka berdasarkan paparan di atas, menjadi menarik tatkala terdapat kajian yang berkenaan dengan Sekolah Islam Terpadu (SIT), sehingga dapat diketahui berbagai upaya “kalangan elite muslim” dalam perkembangan sistem pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah pendidikan Islam yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengungkap kehadiran Sekolah Islam Terpadu dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia melalui kajian perpustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis data-data dari berbagai sumber yang relevan dengan cara *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

A. Sekilas Pembaruan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Menurut Ramayulis (2012: 211-425) seperti yang dikutip Ahmad Lubis (2018:1081), perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ada tiga periode, yaitu: (1) Periode awal masuknya Islam ke Indonesia, (2) Periode masa kolonial, dan (3) Periode pembaharuan pendidikan Islam. Dari ketiga periode ini dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia hanya ada tiga kategori model pendidikan, yaitu; pesantren, sekolah dan madrasah, dengan ciri masing-masing yang bercorak dikotomi, bukan terpadu, terutama model sekolah dan pesantren.

Menurut Karel A. Steenbrink (1986:167) dalam Ahmad Lubis (2018:1081), sistem pendidikan sekolah merupakan kebijakan politik pendidikan yang dirancang Belanda dan diteruskan sampai sekarang. Sementara pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan pengajaran kitab-kitab kuning yang dipimpin para kiyai, dan merupakan ciri khas pendidikan Islam awal yang ada di Indonesia dengan segala varian dan corak ragamnya. Meskipun menurut Karel A. Steenbrink, dua puluh tahun terakhir banyak pesantren telah mengadopsi sistem madrasah dan memasukkan mata pelajaran umum dalam sistem pendidikannya. Sistem madrasah diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Dengan memberikan penekanan pada mata pelajaran agama, pesantren sering kali dianggap tidak mampu merespons kemajuan dan tuntutan zaman.

Pada awalnya, pendidikan agama Islam tidak masuk dalam struktur kurikulum pendidikan nasional, karena agama dianggap wilayah privasi masing-masing orang, dan bahkan terkesan diabaikan. Pada tahun 1989, setelah ada upaya dari para tokoh-tokoh pendidikan Islam, materi Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi materi wajib yang harus ada di sekolah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 dan diperkuat di tahun 2003 dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Meskipun demikian, pendidikan agama Islam kurang mendapat porsi yang cukup dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan. Kurangnya perhatian tersebut merupakan salah satu sebab munculnya gagasan sistem Sekolah Islam Terpadu.

B. Latar Belakang Sejarah Sekolah Islam Terpadu

Pada dekade akhir 1980-an, istilah Sekolah Islam Terpadu mulai bermunculan. Diprakarsai para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam komunitas *Jamaah Tarbiyah* dari berbagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan beberapa universitas ternama lainnya yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para aktivis Islam kampus yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi Islam kepada para mahasiswa. Kalangan pemuda menjadi target utama dari gerakan ini karena mereka percaya bahwa pemuda akan menjadi agen perubahan sosial yang sangat penting dalam melakukan islamisasi seluruh masyarakat Indonesia (Qodir, 2009 dalam Suyatno, 2013: 356)

Tugas untuk menyiapkan generasi muda muslim yang punya komitmen dakwah diyakini akan lebih efisien jika melalui pendidikan dengan mendirikan Sekolah Islam Terpadu. Berawal dari lima satuan sekolah dasar yang berdiri pada tahun 1993, yakni SDIT Nurul Fikri Depok, SDIT Al Hikmah Jakarta Selatan, SDIT Iqro Bekasi, SDIT Ummul Quro Bogor, dan SDIT Al Khayrot Jakarta Timur. Kemudian sejak saat itu, Sekolah Islam Terpadu terus bermunculan dan berkembang hingga saat ini (Hisyam, 2012 dalam Suyatno, 2013: 357).

Hal yang menakjubkan dari Sekolah Islam Terpadu adalah mereka berada di bawah satu payung Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang berdiri pada tahun 2003. Tujuannya untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi berdirinya sekolah-sekolah Islam terpadu. Ada berbagai macam sekolah yang berada di bawah payung JSIT namun operasinya berada di bawah yayasan yang berbeda, seperti al-Mu'adz, Insan Mulia, al-Farabi, Ibnu Abbas, Salman al-Farisi, al-Khairat, dan al-Madinah. JSIT memiliki peran yang sangat penting dalam membantu aktivis dakwah di seluruh Indonesia untuk mengembangkan sekolah-sekolah mereka melalui pertukaran jaringan dan informasi. Dalam konteks ini, JSIT hanya memberikan *blue-print* dan *guide-line* tentang bagaimana mendirikan sekolah. Dengan bergabung JSIT, sekolah diatur di bawah bendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diperkenankan untuk menggunakan kurikulum yang dirumuskan oleh JSIT. JSIT tidak mencampuri urusan internal sekolah, khususnya yang

berhubungan dengan keuangan. Sampai saat ini, JSIT memiliki 7 cabang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia terbagi menjadi tujuh wilayah yang meliputi (1) Sumatra bagian utara, (2) Sumatra bagian selatan, (3) Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, (4) Jawa Tengah dan Yogyakarta, (5) Kalimantan, (6) Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan (7) Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap cabang regional memiliki satu koordinator yang membawahi koordinator distrik. Para koordinator kebanyakan adalah para aktivis dakwah yang berafiliasi kepada Partai Keadilan Sejahtera (Hasan, 2009 dalam Kurnaengsih, 2015:81).

Hasil wawancara Suyatno (2015) dengan MZ, pengurus JSIT Wilayah Yogyakarta mengatakan bahwa sekolah-sekolah Islam Terpadu ini muncul sebagai rasa kekecewaan para aktivis terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat itu. Para aktivis menganggap bahwa pendidikan di Indonesia belum cukup mewakili praktik pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Praktik pendidikan di Indonesia cenderung memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga membuat anak didik mengalami *split personality*. Oleh karena itu Sekolah Islam Terpadu menawarkan satu model pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya lembaga pendidikan Islam terpadu yang secara sosiologis, sistem pendidikan ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap tuntutan globalisasi, antara lain krisis akhlak mulia, kesibukan orang tua, kebutuhan masyarakat akan sekolah unggul, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terpadu, persepsi masyarakat terhadap mutu pendidikan Islam, orientasi pendidikan bersifat kognitif, dan dikotomi pendidikan di Indonesia.

C. Sekolah Islam Terpadu Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Suyatno (2015) penggunaan nama “sekolah” pada Sekolah Islam Terpadu sudah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini lebih dekat kepada ciri sekolah umum di bawah pengawasan Kemendikbud, dan bukan madrasah ataupun pesantren di bawah pengawasan Kemenag. Penggunaan istilah “sekolah” sendiri seperti diakui oleh para pendiri Sekolah Islam Terpadu didasarkan atas pertimbangan pragmatis bahwa selama ini sekolah lebih diminati oleh para orang tua dan peserta didik dari berbagai kalangan di Indonesia daripada madrasah maupun pesantren. Sedangkan kata “terpadu” merupakan konsep yang digunakan untuk membangun citra sekolah Islam terpadu bahwa di samping pengembangan sains dan teknologi, mereka juga mengembangkan pendidikan agama yang *excellent*. Kata “terpadu” sendiri merupakan simbol adanya kesatuan antara pengembangan sains dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman.

Dari aspek kurikulum, Sekolah Islam Terpadu secara total mengadopsi kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua mata pelajaran yang ada dalam kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepenuhnya “diterima” dan diajarkan. Lima rumpun mata pelajaran yang ada dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri dari rumpun mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, serta Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan merupakan bagian integral dari struktur kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Bahkan diakui oleh para pendiri Sekolah Islam Terpadu, lima rumpun mata pelajaran tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, mempelajari sains dan teknologi merupakan bagian pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt., Sekolah Islam Terpadu hanya menambah beberapa mata pelajaran dalam struktur kurikulumnya, yang dinamakan dengan program keislaman Terpadu-an (ke-IT-an). Oleh karena itu, diintegrasikannya antara kurikulum pendidikan agama dan umum ditambah dengan program ke-IT-annya merupakan upaya untuk melakukan Islamisasi kurikulum pendidikan (Suyatno, 2015).

Adapun sistem evaluasi yang dilaksanakan pada Sekolah Islam Terpadu mengacu pada sistem penilaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem penilaian terdiri dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas; sedangkan ujian meliputi ujian nasional dan ujian sekolah. Sistem penilaian tersebut dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari adopsi kurikulum yang dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu. Selain itu, fakta bahwa tidak semua alumni Sekolah Islam Terpadu melanjutkan di sekolah yang sama pada jenjang berikutnya mengharuskan sekolah ini melaksanakan sistem penilaian yang diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan lain. Namun demikian, Sekolah Islam Terpadu sangat menekankan penilaian aspek afektif dan psikomotorik, selain penilaian kognitif melalui ulangan harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir sekolah (Suyatno, 2015).

Untuk menjaga kualitas guru, proses seleksi dilaksanakan oleh JSIT, guru diwajibkan memiliki hafalan dari beberapa juz Alquran, memakai kerudung besar bagi guru perempuan. Keberadaan guru di sekolah ini tidak dapat lepas sepenuhnya dari kebijakan pendidikan nasional. Di samping mengikuti program sertifikasi JSIT, para guru di Sekolah Islam Terpadu juga mengikuti program sertifikasi guru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari Sekolah Islam Terpadu sebagai sekolah swasta yang tidak sepenuhnya mampu memberi gaji guru dari kantong pribadi sekolah (Suyatno, 2015).

Kesimpulan

Kemunculan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia pada dekade 80-an merupakan kelanjutan dari pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem terpadu atau integral yang digagas para pendiri sekolah Islam terpadu bukanlah pemikiran baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sebab jauh sebelumnya sudah muncul gagasan yang sama seperti *Adabiyah School*, *Diniyah School*, PENDIS, Normal Islam, serta pendidikan Islam yang didirikan Jam'iyah Al Khair Jakarta,

Muhammadiyah Yogyakarta, Al Irsyad Jakarta dan Surabaya, Persatuan Islam Bangil dan lain sebagainya.

Meskipun munculnya sekolah Islam terpadu merupakan respons atas ketidakpuasan terhadap praktik pendidikan di Indonesia, hingga saat ini, Sekolah Islam Terpadu tetap menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan Sekolah Islam Terpadu lebih tepat jika dikatakan sebagai upaya untuk melakukan islamisasi terhadap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Islamisasi dilakukan terhadap semua komponen pendidikan, baik tujuan pendidikan, kurikulum, strategi, sumber belajar, hingga guru yang dianggap sebagai ujung tombak dalam pendidikan

Referensi

- Abdussyukur. (2018). Konsep dan Praktik Sekolah Islam Terpadu dan Implikasinya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia, Disertasi Doktor pada PPS Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: tidak diterbitkan
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Lubis, A. (2018). Sekolah Islam terpadu dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya BPNB Sumatera Barat*, 4(2), 1077-1095. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/14622>
- Nata, A. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, A. (2019). *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Kurnaengsih, M. A. (2015). Konsep Sekolah Islam Terpadu. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 78-84. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v2i1.14
- Syafri, U, A. (2022). *Penidikan Bukan-bukan Menyingkap Pendidikan Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Suyatno, S. (2016). Sekolah Islam Terpadu Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Al-Qalam*, 21(1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v21i1.213>
- Suyatno, S. (2013). Sekolah Islam terpadu; Filsafat, ideologi, dan tren baru pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 355. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.355-377>